

BAB V

PENUTUP

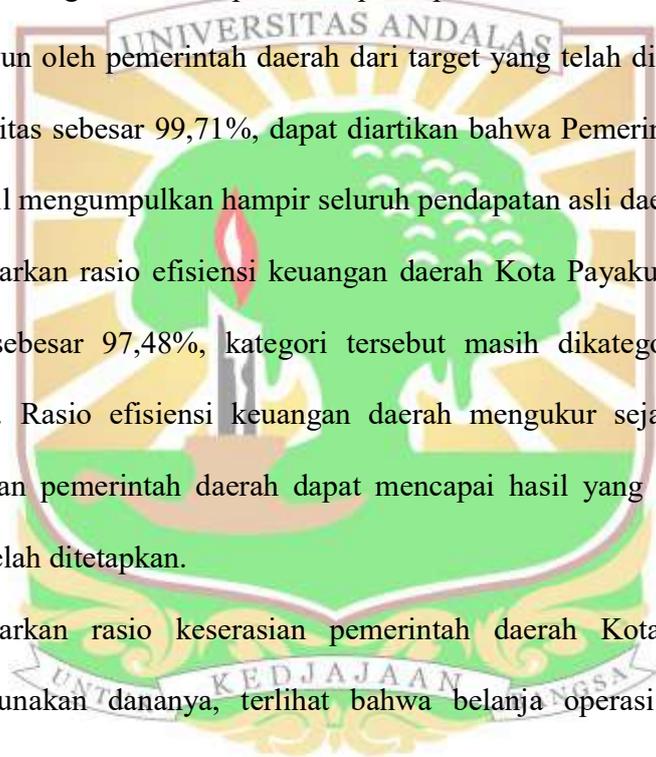
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan analisa kinerja keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan rasio derajat desentralisasi, kinerja pemerintah Kota Payakumbuh menunjukkan rata-rata rasio derajat desentralisasi selama 5 tahun terakhir sebesar 14,32% menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan berasal dari transfer dana dari pemerintah pusat atau sumber-sumber lain di luar PAD. Dalam hal ini, rasio 14,32% dapat dianggap rendah, karena menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap transfer dana dan sumber-sumber eksternal lainnya..
2. Rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar 83,45% dengan kriteria kategorisasi bahwa tingkat ketergantungan tersebut sangat tinggi karena melebihi 50%. Jika rasio ketergantungan keuangan daerah melebihi 50%, itu menandakan bahwa sebagian besar pendapatan pemerintah daerah bersumber dari transfer dana atau dana yang berasal dari pihak lain, bukan dari Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan secara mandiri oleh daerah itu sendiri. Dalam konteks ini, rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar 83,45% menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Payakumbuh sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat atau sumber-sumber eksternal lainnya untuk membiayai kegiatan dan program di wilayahnya.
3. Berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah yang diukur selama 5 tahun dengan rata-rata sebesar 17,15%, kategori tersebut termasuk rendah sekali. Hal ini

menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh masih sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat atau sumber-sumber eksternal lainnya dalam menjalankan kegiatan daerah.

4. Rasio berdasarkan rasio efektivitas pendapatan asli daerah Kota Payakumbuh yang dilihat dari rata-rata selama 5 tahun terakhir sebesar 99,71%, kategori tersebut dapat dikategorikan sebagai efektif. Rasio efektivitas pendapatan asli daerah mengukur seberapa besar pendapatan asli daerah (PAD) yang berhasil dihimpun oleh pemerintah daerah dari target yang telah ditetapkan. Dengan rasio efektivitas sebesar 99,71%, dapat diartikan bahwa Pemerintah Kota Payakumbuh berhasil mengumpulkan hampir seluruh pendapatan asli daerah yang ditargetkan.
5. Berdasarkan rasio efisiensi keuangan daerah Kota Payakumbuh dengan rata-rata rasio sebesar 97,48%, kategori tersebut masih dikategorikan sebagai kurang efisien. Rasio efisiensi keuangan daerah mengukur sejauh mana penggunaan anggaran pemerintah daerah dapat mencapai hasil yang diharapkan atau target yang telah ditetapkan.
6. Berdasarkan rasio keserasian pemerintah daerah Kota Payakumbuh dalam menggunakan dananya, terlihat bahwa belanja operasi mendominasi APBD dengan rata-rata sebesar 78,88%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran pemerintah daerah digunakan untuk keperluan operasional dan rutin dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan layanan publik. Sedangkan rasio belanja modal terhadap APBD yang rendah sebesar 20,54% menunjukkan bahwa belanja modal masih mendapatkan alokasi anggaran yang terbatas dibandingkan



dengan belanja operasi. Hal ini menyebabkan rasio keserasian di Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh lebih didominasi oleh belanja operasi.

7. Rasio pertumbuhan Kota Payakumbuh mengalami pertumbuhan positif dan negatif. Pada tahun 2017 dan 2019, rasio pertumbuhan pendapatan mengalami pertumbuhan positif, sedangkan pada tahun 2018, 2020, dan 2021 rasio pertumbuhan pendapatan mengalami pertumbuhan negatif. Sehingga rata-rata rasio pertumbuhan pendapatan selama 5 tahun mengalami pertumbuhan negatif yaitu sebesar 1,10%. Dengan data rasio pertumbuhan belanja pada tahun 2017, 2020, dan 2021 mengalami pertumbuhan negatif, dan rata-rata dari rasio pertumbuhan belanja selama 5 tahun mengalami pertumbuhan negatif sebesar 1,72%, ini menunjukkan bahwa belanja daerah Kota Payakumbuh mengalami penurunan dari periode ke periode selama rentang waktu tersebut.

Secara keseluruhan kinerja Kota Payakumbuh yang diukur menggunakan rasio keuangan daerah untuk tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami penurunan. Penurunan kinerja Kota Payakumbuh yang diukur menggunakan rasio keuangan daerah selama periode tahun 2017 hingga tahun 2021 dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah dan besarnya dana bantuan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pengelolaan keuangan daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa kinerja keuangan pemerintah Kota Payakumbuh dapat ditingkatkan dengan berbagai cara baik melalui upaya pemerintah daerah maupun partisipasi aktif dari masyarakat. Maka penulis

memberikan saran yang dapat direkomendasikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Payakumbuh

Meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya merupakan langkah yang sangat penting bagi Pemerintah Kota Payakumbuh untuk mencapai kemandirian keuangan dan meminimalisir ketergantungan pada dana bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi. Selain itu, menjaga stabilitas Pendapatan Asli Daerah yang telah dicapai juga penting untuk memastikan hasilnya dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis menyadari bahwa penelitian yang dilakukan ini masih banyak keterbatasannya, penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah memang merupakan hal yang kompleks dan memerlukan analisis yang mendalam. Penggunaan lebih banyak rasio keuangan dapat memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai kinerja keuangan suatu pemerintah daerah, sehingga hasil penelitian menjadi lebih andal dan akurat.

3. Bagi Masyarakat

Partisipasi aktif dan sinergi antara Pemerintah Kota Payakumbuh dan masyarakat sangat penting dalam mencapai pembangunan daerah yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, sementara masyarakat sebagai pemangku kepentingan memiliki peran dalam memberikan dukungan,

partisipasi, dan pengawasan terhadap kegiatan perekonomian dan pengelolaan keuangan daerah.

